

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PERUMDA BPR KUNINGAN
TAHUN 2023**



**Jalan Jenderal Sudirman No. 88 Kabupaten Kuningan
TELEPON: (0232) 8880207**

BAB I

PENJELASAN UMUM

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG – Good Corporate Governance) pada Perumda BPR Kuningan pada tahun 2023 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja Perumda BPR Kuningan meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2023 di tengah pemulihan atas dampak pandemi COVID-19 yang menekan dunia usaha pada umumnya dan perbankan pada khususnya.

Dalam menjalankan operasional perbankan Perumda BPR Kuningan senantiasa memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian Bank (prudential banking practices). Hal ini sudah menjadi kebutuhan Perumda BPR Kuningan dan juga untuk menegakkan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan nilai-nilai etika yang berlaku umum serta melaksanakan kegiatan usaha dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Penerapan Tata Kelola.

Dengan penerapan Tata Kelola yang baik, Perumda BPR Kuningan secara konsisten dan berkesinambungan didukung oleh integritas dan komitmen tinggi yang dilakukan melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan dan jenjang organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Pengawas yang memiliki peranan sentral dalam pelaksanaan penerapan Penerapan Tata Kelola di lingkungan Perumda BPR Kuningan. Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan kunci utama bagi Perumda BPR Kuningan dalam mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan melalui lima prinsip utama yaitu: Transaransi, Akuntabilitas, pertanggungjawaban, indenpendensi dan kewajaran (fairness).

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Dodo Warda, SE
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perumda BPR Kuningan. 2. Wajib mengelola Perumda BPR Kuningan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perumda BPR Kuningan dan peraturan perundangundangan. 3. Wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Perumda BPR Kuningan di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 4. Wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Perumda BPR Kuningan, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. 5. Wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada KPM. 6. melaksanakan manajemen Perumda BPR Kuningan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun perencanaan; b. pengurusan/pengelolaan; dan c. pengawasan kegiatan operasional. 7. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda BPR Kuningan berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas; 8. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis Perumda BPR Kuningan kepada KPM melalui Dewan Pengawas yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan; 9. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perumda BPR Kuningan; 10. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan 11. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 			
2.	Nama	:	Deni Heryana, S.sos
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan Langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan Perumda BPR Kuningan telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati- hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan / atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau peraturan perundang-undangan lain. 2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perumda BPR Kuningan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan. 3. Memantau dan menjaga kepatuhan Perumda BPR Kuningan terhadap seluruh komitmen yang telah dibuat oleh Perumda BPR Kuningan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain. 4. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. 5. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Pengawas secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai Perumda BPR Kuningan. 6. Melaporkan kepada Dewan Pengawas secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi Perumda BPR Kuningan. 			
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi telah mengupayakan target yang tercantum dalam RBB tahun 2023 untuk dapat dicapai. 2. Direksi telah melakukan tindak lanjut atas pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan Audit Intern. 3. Direksi telah melaksanakan rekomendasi berupa pembuatan program implementasi transaksi keuangan tunai desa, melakukan pemindahan alamat Kantor Kas Sangkanhurip dan melaksanakan promosi / mutasi untuk mengisi kekosongan jabatan. 			

4. Rencana bisnis bank tahun 2024 telah selesai disusun dan disyahkan oleh KPM serta telah dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku.
Penjelasan Lebih Lanjut :
<ul style="list-style-type: none"> - Direksi diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kuningan setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). - Sdr. Deni Heryana, S.Sos merupakan Direktur yang merangkap jabatan sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Drs. H. Kamil Ganda Permadi, MM
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Dewan Pengawas wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. 2. Dewan Pengawas wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Perumda BPR Kuningan di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 3. Dewan Pengawas wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada point (3), Dewan Pengawas wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perumda BPR Kuningan. 5. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada point (3), Dewan Pengawas dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional Perumda BPR Kuningan, kecuali terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit Perumda BPR Kuningan; dan b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 6. Pengambilan keputusan oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada point (5) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan Perumda BPR Kuningan. 7. Dewan Pengawas wajib : <ol style="list-style-type: none"> a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan b. membuat dan memelihara risalah rapat. 8. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada point (2) dilakukan secara : <ol style="list-style-type: none"> a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. 9. Dewan Pengawas wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Perumda BPR Kuningan, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. 		
2.	Nama	:	Drs. H. Uca Somantri, M.Si
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Pengawas wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. 2. Dewan Pengawas wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Perumda BPR Kuningan di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 3. Dewan Pengawas wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada point (3), Dewan Pengawas wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perumda BPR Kuningan. 5. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada point (3), Dewan Pengawas dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional Perumda BPR Kuningan, kecuali terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit Perumda BPR Kuningan; dan b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 6. Pengambilan keputusan oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada point (5) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan Perumda BPR Kuningan. 7. Dewan Pengawas wajib : <ol style="list-style-type: none"> a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan 		

b. membuat dan memelihara risalah rapat. 8. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada point (2) dilakukan secara : a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. 9. Dewan Pengawas wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Perumda BPR Kuningan, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
Rekomendasi Kepada Direksi :
1. Evaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit tahun buku 2022. 2. Persetujuan Pemindahan Kantor Kas Sangkanhurip. 3. Perubahan RBB 2023. 4. Pengisian kekosongan jabatan. 5. Tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Direksi terkait Restrukturisasi Kredit. 6. Rekomendasi Program Transaksi Non Tunai. 7. Tindak lanjut pemeriksaan OJK tahun 2023.
Penjelasan Lebih Lanjut :
Dewan Pengawas / Komisaris diangkat oleh Kuasa Pemilik Modal (KPM) berdasarkan kepada Keputusan Bupati Kuningan setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
.	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	.	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
.			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Dodo Warda, SE	Rp0	0%
2.	Deni Heryana, S.sos	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Anggota Direksi tidak memiliki saham di Perumda BPR Kuningan, karena kepemilikan saham 100% milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Dodo Warda, SE	-	-	0%
2.	Deni Heryana, S.sos	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi Perumda BPR Kuningan tidak memiliki saham pada perusahaan lain.				

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Dodo Warda, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Deni Heryana, S.sos	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi Perumda BPR Kuningan tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota direksi lain, dewan komisaris dan pemegang saham.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Dodo Warda, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Deni Heryana, S.sos	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi Perumda BPR Kuningan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anggota direksi lain, dewan komisaris dan pemegang saham				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Drs. H. Kamil Ganda Permadi, MM	Rp0	0%
2.	Drs. H. Uca Somantri, M.Si	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Anggota Dewan Komisaris / Dewan Pengawas Perumda BPR Kuningan tidak mempunyai kepemilikan saham di Perumda BPR Kuningan,			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Drs. H. Kamil Ganda Permadi, MM	-	-	0%
2.	Drs. H. Uca Somantri, M.Si	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris / Dewan Pengawas Perumda BPR Kuningan tidak mempunyai kepemilikan saham pada Perusahaan Lain.				

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Drs. H. Kamil Ganda Permadi, MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Drs. H. Uca Somantri, M.Si	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris / Dewan Pengawas Perumda BPR Kuningan tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Dewan Komisaris lain, Anggota Direksi dan Pemegang Saham.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Drs. H. Kamil Ganda Permadi, MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Drs. H. Uca Somantri, M.Si	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris / Dewan Pengawas Perumda BPR Kuningan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris / Dewan Pengawas lain, Anggota Direksi dan Pemegang Saham.				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp291.168.000	2	Rp369.861.120
2.	Tunjangan	2	Rp831.320.380	2	Rp82.525.904
3.	Tantiem	2	Rp82.362.600	2	Rp32.945.765
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp1.204.850.980		Rp485.332.789
Penjelasan Lebih Lanjut :					
.					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Masing-masing Anggota Direksi mendapatkan Tunjangan Perumahan (2)	Tidak ada
2.	Transportasi	Masing-masing Anggota Direksi Mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat (2)	Masing-masing Anggota Komisaris mendapat fasilitas 1 unit kendaraan bermotor roda empat (2)
3.	Asuransi Kesehatan	Masing-masing Anggota Direksi mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan (2)	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Masing-masing Anggota Direksi mendapatkan tunjangan komunikasi (2), Masing-masing Anggota Direksi mendapatkan fasilitas BPJS Ketenaga Kerjaan (2)	Masing-masing Anggota Dewan Komisaris mendapatkan fasilitas tunjangan komunikasi (2)
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas perumahan untuk direksi diberikan dalam bentuk tunjangan perumahan dan diberikan setiap bulan. Fasilitas komunikasi untuk direksi dan dewan pengawas diberikan dalam bentuk tunjangan komunikasi / paket data dan diberikan setiap bulan.			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5.33 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.27 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3.06 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.4 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Gaji yang dimaksud adalah merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan-tunjangan selama tahun 2023.	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	02 Februari 2023	2	Pembahasan hasil konfirmasi evaluasi RBB tahun 2023 dengan OJK Cirebon.
2.	15 Juni 2023	2	Pembahasan rencana perubahan RBB tahun 2023
3.	03 Agustus 2023	16	Pembahasan evaluasi Kinerja Triwulan II tahun 2023.
4.	21 Oktober 2023	2	Pembahasan persiapan program transaksi non tunai (NCT) dan kekosongan jabatan.
5.	03 November 2023	16	Evaluasi kinerja triwulan III tahun 2023
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
.Rapat evaluasi kinerja Triwulan II dan Triwulan III dihadiri oleh Dewan Pengawas, Direksi dan Seluruh Pejabat Eksekutif.			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Drs. H. Kamil Ganda Permadi, MM	5	0	100%
2.	Drs. H. Uca Somantri, M.Si	5	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tingkat kehadiran Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas dalam pelaksanaan rapat sebesar 100%.				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	1	1	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		1		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
<p>Dalam tahun 2023 terdapat penyimpangan internal di Perumda BPR Kuningan namun hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap operasional Perumda BPR Kuningan. Adapun pelanggaran tersebut telah selesai ditindaklanjuti internal Perumda BPR Kuningan.</p> <p>Pengendalian Internal berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi fraud dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang tujuannya untuk membantu Perumda BPR Kuningan mencapai suatu tujuan tertentu. Selain itu pengendalian internal juga berfungsi agar kegiatan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan usaha Perumda BPR Kuningan. Untuk membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris, Direksi telah mengangkat Pejabat Eksekutif Audit Internal untuk melakukan pengawasan operasional Perumda BPR Kuningan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. PEAI bersifat independen terhadap fungsi operasional Perumda BPR Kuningan, penyampaian laporan hasil pemeriksaan di Kantor Pusat, Kantor Cabang disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.</p>								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Selama tahun 2023 tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi Perumda BPR Kuningan.		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Penerima Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							

Penjelasan Lebih Lanjut :
.

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	02 Januari 2023	Sosial	Bantuan pemeliharaan mushola	Dusun Kamukten	Rp250.000
2.	16 Februari 2023	Sosial	Sumbangan pembangunan mushola nurul islam	Lingkungan Lamepayung Kelurahan Kuningan	Rp500.000
3.	04 April 2024	Sosial	Festival Ramadhan	Diskopdagperin Kuningan	Rp1.000.000

Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik
Kegiatan Sosial yang dilakukan Perumda BPR Kuningan tahun 2023 yaitu program untuk membantu masyarakat berupa kegiatan sosial atau lingkungan yang pelaksanaannya tidak terprogram dan bersifat bantuan atau program amal atau juga disebut dengan program non kemitraan.

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: Perumda BPR Kuningan
Alamat	: Jalan Jenderal Sudirman No. 88 Kabupaten Kuningan
Nomor Telepon	: (0232) 8880207
Posisi Laporan	: Desember 2023
Modal Inti	: Rp31.119.566.441
Total Aset	: Rp249.607.298.198

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG Perumda BPR Kuningan Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 1.9 dengan predikat Baik (2)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.67	0.334
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.61	0.242
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2	0.2
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.18	0.218
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.1	0.21
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.6	0.04
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.96	0.196
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.2	0.165
10	Rencana Bisnis BPR	2.27	0.17
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.95	0.146
Nilai Komposit			1.9
Peringkat Komposit			2
Predikat Komposit			Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.67)

Jumlah Anggota Direksi perumda BPR Kuningan sebanyak 2 (dua) orang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur yang juga merangkap sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.61)

Jumlah Dewan Pengawas Perumda BPR Kuningan sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari Ketua Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengawas.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Belum menerapkan komite (sesuai modal inti saat ini).

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

Perumda BPR Kuningan telah memiliki kebijakan penanganan benturan kepentingan dan telah dilaksanakan dengan baik.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.18)

Perumda BPR Kuningan telah memiliki Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah langkah yang bersifat memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Perumda BPR Kuningan telah sesuai ketentuan OJK dan peraturan lainnya.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.1)

Pejabat Eksekutif Audit Intern Perumda BPR Kuningan telah melaksanakan penerapan Fungsi Audit Intern dan Independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.6)

Perumda BPR Kuningan telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan hasil audit eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi Perumda BPR Kuningan, hasil audit telah disampaikan langsung oleh audit eksternal kepada OJK.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.96)

Perumda BPR Kuningan telah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan telah menilai hasil penerapan manajemen risiko dalam bentuk Profil Risiko setiap akhir bulan Juni dan desember.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.2)

Perumda BPR Kuningan telah memiliki dan mempedomani prosedur BMPK dan dalam menjalankan operasional selalu melaksanakan prinsip kehati-hatian agar tidak melanggar ketentuan BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2.27)

Rencana Bisnis Bank Perumda BPR Kuningan telah disusun Direksi, disetujui Dewan Pengawas dan Disahkan oleh KPM serta disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.95)

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perumda BPR Kuningan telah didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan. Perumda BPR Kuningan juga telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan analisa terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa :

Faktor Positif Aspek Governance Struktur adalah Perumda BPR Kuningan senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik. Sedangkan dari sisi Faktor Negatif Aspek Governance Struktur untuk mendukung operasional Perumda BPR Kuningan masih dibutuhkan rekrutmen Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

Untuk faktor Positif Aspek Governance Process yaitu tugas dan fungsi semua bagian sudah dtuangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. Perumda BPR Kuningan senantiasa mendorong budaya kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko.

Dari sisi Faktor Positif Aspek Governance output bahwa Perumda BPR Kuningan masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik. Kecukupan permodalan memadai, dapat mengcover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya.

Sedangkan dari sisi Faktor Negatif Aspek Governance output yaitu selama tahun 2023 masih terdapat pengenaan sanksi baik administratif maupun sanksi denda oleh regulator (OJK).

Kuningan, 09 Januari 2024

Perumda BPR Kuningan

Disetujui Oleh :



Dodo Warda, SE
Direktur Utama



Drs. H. Kamil Ganda Permadi, MM
Ketua Dewan Pengawas